

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan perannya sebagai penyelenggara roda pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...", sehingga dibutuhkan adanya pembangunan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan program bantuan sosial lainnya.

Penyusunan kebijakan dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih berfokus pada masalah kemiskinan yang menjadi kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kemiskinan sebagai sebuah permasalahan yang kompleks dan menjadi salah satu masalah yang mendapat pusat perhatian memerlukan tindakan pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dilihat dari berbagai aspek kehidupan, dibahas secara detail hingga ke lini tekecil dan dilakukan secara sistematis. Kemiskinan yang umumnya terdapat pada negara-negara berkembang, pernah pula dialami oleh negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pada penghujung tahun 1700-an, Negara Inggris mengalami kemiskinan pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Keadaan kaum miskin pada saat itu di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik atau buruh yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di pemukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah Bappenas mendefinisikan kemiskinan dipandang sebagai suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Levitan (1969) mengemukakan kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Levitan menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan pendapatan, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk hidup



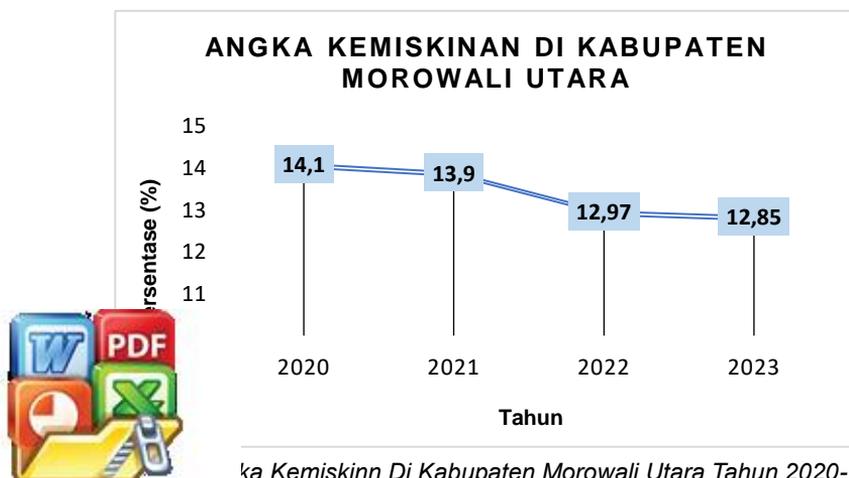
Soekanto (1982) mengartikan kemiskinan sebagai suatu seorang tidak mampu memelihara dirinya sesuai dengan taraf dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun psikis tersebut.

Secara hakekatnya adalah situasi serba kekurangan yang terjadi disebabkan oleh individu atau kelompok tersebut, tetapi karena tidak adanya kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai

dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan yang seakan-akan tidak bisa diubah, yang tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya produktivitas, ditambah lagi oleh terbatasnya modal yang dimiliki.

Keadaan penduduk di Indonesia yang masih banyak terdapat masyarakat dengan golongan kurang mampu, mendorong pemerintah dalam membuat kebijakan yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satunya melalui program penurunan tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tentu diperlukan informasi relevan yang mendukung berbagai upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Sehingga dalam menjalankan kebijakan pemberian bantuan sosial, juga melihat dari besarnya penduduk yang ada dengan golongan yang berbeda-beda, diperlukan sistem informasi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan yaitu melalui penyediaan data masyarakat. Selain untuk mempercepat proses penyaluran kebijakan, sistem tersebut juga ditujukan agar kebijakan dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menjadi tuntutan bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan data yang tepat sehingga bantuan dapat tersalurkan kepada penerima secara tepat pula. Pengelolaan data ini berkaitan dengan sumber daya, baik itu berbagai perangkat dan sumber daya manusia.

Program bantuan sosial untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Kini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara indeks pembangunan Manusia naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017. Sejatinya program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat penerima manfaat bantuan sosial untuk menjaga harapan hidupnya dan penghidupannya.



Angka Kemiskinn Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan data fakir miskin di lingkup nasional, tugas Dinas Sosial Provinsi sebagai pengelolaan data fakir miskin di lingkup provinsi, sedangkan tugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota ialah melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin di lingkup kabupaten/kota dengan melakukan pemutakhiran data DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data untuk menghasilkan data yang berkualitas yaitu data yang akurat, lengkap, relevan dan sesuai dengan di lapangan. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui proses pendataan, verifikasi dan validasi, pengendalian/penjaminan kualitas, penetapan, dan penggunaan. Bila diuraikan secara lebih rinci dari proses tersebut, yaitu di mulai dari pendaftaran diri oleh fakir miskin ke Kepala Desa/Lurah dengan menyertakan KTP beserta KK, kemudian Kepala Desa/Lurah melaksanakan musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut disampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat. Selanjutnya dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga dan melalui Bupati/Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke Menteri melalui Gubernur yang kemudian Menteri Sosial menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga data tersebut dipergunakan dalam program Bansos dan Pemberdayaan baik oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dalam praktiknya, pemerintah daerah juga berperan dalam memperbarui data DTKS melalui sistem informasi kesejahteraan sosial.

Dalam penanggulangan kemiskinan selain melalui program-program yang inovatif, tentu juga harus didukung dengan adanya kriteria kemiskinan yang jelas. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan Kemensos dalam menetapkan masyarakat yang layak menerima bantuan sosial yang dilihat dari aspek tempat tinggal sehari-hari, status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Menurut Kemensos, masih terdapat banyak masyarakat yang terdaftar pada data penerima bantuan sosial, tetapi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, seperti masyarakat yang memiliki kondisi rumah dengan kendaraan yang bagus, bahkan masih banyak ASN yang terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut. Masalah ketidaktepatan sasaran ini harus terus mendapat perbaikan oleh pemerintah dengan melakukan pembaharuan data secara berkala. Dibutuhkan pula



nelalui kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu secara itah daerah sebagai penyelenggara dalam proses pendataan. an data ini masih terus menjadi masalah yang berulang, h pada proses penyaluran bantuan sosial seperti adanya menyalurkan bantuan tersebut.

sebagai keseriusan pemerintah daerah kabupaten Morowali ara kesejahteraan sosial masyarakatnya, pemerintah daerah

membuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang memuat informasi mengenai kesejahteraan sosial di Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai lembaga pengelola, menjadikan data tersebut sebagai sumber acuan dalam menetapkan sasaran penerima manfaat dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, DTKS memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan efisien, itulah pentingnya dilakukan pengelolaan terhadap sistem data tersebut sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas.

Kabupaten Morowali Utara sebagai fokus penelitian tercatat memiliki tren positif artinya angka kemiskinan di kabupaten menurun, menunjukkan harapan atas prospek pemulihan ekonomi, serta menjadi sebuah legitimasi atas keseriusan kerja pemerintah. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Morowali Utara, persentase penduduk miskin pada 2021 sebesar 13,90 persen atau membaik sekitar 0,2 persen. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat perlahan membuahkan hasil. Agenda untuk terus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh kini semakin dipacu oleh pemerintah kabupaten Morowali Utara yang disusun dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program pemberdayaan tersebut dinamakan dengan Morut Gempar atau Gerakan Menanam Pekarangan, yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memperkecil kesenjangan antara masyarakat mampu dan kurang mampu, serta mengeliminasi prevalensi stunting di kabupaten Morowali Utara. Program ini dikonstruksikan dengan menyasar keluarga miskin yang terdaftar di dalam DTKS dan memiliki anggota keluarga stunting. Keluarga penerima manfaat tersebut mendapatkan bantuan bibit tanaman dan kolam terpal serta benih ikan unggul yang menjadi sumber protein bagi keluarga penerima manfaat. Hal ini membuktikan bahwa melalui sistem DTKS ini bisa juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan program tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat. Beberapa bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Tunai Langsung (BLT). Beberapa program ini juga menggunakan DTKS sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan sosial. Berdasarkan rekap DTKS di



Utara, terdapat sebanyak 58.264 individu dan 25.245 jumlah ar pada sistem DTKS ini.

sebuah sistem pendataan pada umumnya memiliki beberapa erkecuali DTKS Pemerintah Morowali Utara seperti banyaknya terakhir ada penerima bantuan sosial yang sudah meninggal aftar secara aktif sebagai penerima bantuan sosial, masih ada belum diverifikasi oleh desa menurut tingkatan kemiskinan yang

semuanya itu bermuara pada permasalahan kurang tepat sasaran penerima bantuan sosial ini. Berdasarkan rekap DTKS Kabupaten Morowali Utara, terdapat sebanyak 2.143 data temuan yang belum diverifikasi, sementara jumlah data anomali yang belum diperbaiki ada sebanyak 2.209 data dan terdapat sebanyak 55.875 data yang belum pemuktakhiran data dukcapil terakhir (>2 bulan).

Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena melihat dari alur koordinasi pemerintah daerah sebagai pemegang data kesejahteraan sosial di daerahnya berkewajiban memberikan datanya kepada pemerintah pusat untuk disalurkan bantuan sosial kepada penerima. Program ini sangat diperlukan koordinasi yang baik antar instansi supaya penyaluran bantuan sosial ini tepat sasaran kepada penerima yang berhak mendapatkannya. Begitu banyaknya masalah yang ditemukan mengenai program pemerintah berupa bantuan sosial, ini menjadi tugas penting bagi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah untuk menemukan solusi sehingga masyarakat penerima manfaat bantuan sosial bisa merasakan secara nyata dan langsung program bansos pemerintah agar tercapai masyarakat yang hidup sejahtera. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai : “Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara”. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimana pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah Morowali Utara? (2) Apa faktor yang mempengaruhi dalam proses pengelolaan sistem informasi manajemen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Kabupaten Morowali Utara?

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan penelitian ini oleh beberapa penulis dapat dilihat dalam penjelasan dibawah:

1. Penelitian oleh Ulum dkk dengan judul Efektivitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berbasis Aplikasi SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Sampang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan Kementerian Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, namun belum optimal. Faktor penghambat ialah masih banyaknya data masyarakat yang tidak sinkron dengan data di Disdukcapil, penggunaan data penerima bantuan sosial banyak yang belum terupdate dan data yang ditetapkan Kementerian Sosial masih tidak tepat sasaran.



eh Lasari dan Ali dengan judul Strategi Pengelolaan Data ejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sosial Kabupaten Agam. Hasil dari penelitian ini dapat bahwa pada komponen tujuan, pemerintah Kabupaten Agam misi yang jelas, arah kebijakan dan perubahan paradigma mpin akan menjadi ciri utama dalam kepemimpinan strategis kabupaten Agam dalam satu periode pemerintahan. Kemudian

pada komponen lingkungan, ditinjau dari komponen lingkungan, strategi pengelolaan DTKS dalam pemberian bantuan sosial di Kabupaten Agam, dapat dikatakan bahwa aspek sumber daya dari lingkungan internal dan eksternal belum terpenuhi. Selanjutnya pada komponen pengarahan, organisasi pada umumnya tidak bisa mencapai tujuan ketika semua kewenangan dan urusan diambil alih sendiri. Diperlukan suatu pembagian kewenangan serta pengarahan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ditinjau dari komponen aksi, pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Agam sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum optimal karena masih ditemukan masalah data mulai dari NIK, Nama, alamat yang tidak sinkron dan data belum terbaharui.

3. Penelitian oleh Santoso, Kurniawati, dan Dhani dengan judul Kajian Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang. Di temukan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di Kota Semarang belum dilakukan secara optimal, masih memerlukan perbaikan dan evaluasi dalam pelaksanaannya terutama fasilitator dalam mendata masyarakat yang kurang administrasi kependudukannya, masyarakat yang pundah, yang sudah meninggal, dan lain-lain. Faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial di Kota Semarang, yaitu penentuan tingkat kemiskinan, koordinasi yang belum maksimal, pergantian petugas verifikasi dan validasi data, kesadaran aparat terkait. Kemudian dalam pengelolaan data yang dilakukan setiap OPD, data kemiskinan di Kota Semarang belum ada keterpaduan antar OPD, terutama dengan dinas Sosial Kota Semarang. Pemutakhiran data dari hasil pendataan yang ditugaskan kepada Dinas Sosial masih dirasa cukup berat karena Seksi Pengolahan Data tidak didukung oleh SDM, baik jumlah maupun kompetensi serta sarana dan prasarana (hardware maupun software).

Beberapa penelitian diatas terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sama-sama meneliti mengenai masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos karena data yang mengacu pada DTKS belum diperbaharui yang dalam proses pengelolaannya melibatkan lembaga dan pemerintah daerah. Perbedaan dari penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus yang dimana pada penelitian ini melihat bagaimana mekanisme pengelolaan pada DTKS.



ri

Pengelolaan

adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara erupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat ng tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai

untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Terry (2009) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya Menurut Candra dan Rifa'l, pengelolaan disebut sebagai manajemen, yaitu *to manage* yang berarti mengelola. Maksudnya ialah mengelola dalam timbulnya suatu masalah, mengelola proses, apa dan siapa yang mengelola, mengapa harus dikelola dan apa tujuan dari pengelolaan tersebut. Juga mengelola tentang proses mengerakkan semua sarana/alat sumber daya agar berjalan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan atau juga sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, tetapi meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diikut dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Richard (2007) menjelaskan bahwa fungsi pengelolaan dapat dikaitkan sama dengan fungsi manajemen karena pengelolaan merupakan proses pengatur jalan suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Fayol (1954) menyatakan bahwa fungsi dasar manajemen terdiri dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pengarahan), *coordinating* (pengkoordinasian), dan *controlling* (pengendalian).



n
n menjadi fungsi dasar dalam suatu pengelolaan, dimana organisasi lainnya harus didasarkan pada perencanaan awal. n merupakan proses dalam membuat dan menentukan tujuan membuat langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Menurut Fayol perencanaan berupa penentuan langkah awal yang memungkinkan organisasi mampu mencapai suatu tujuan dan juga menyangkut tentang upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan sebuah strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target tujuan suatu organisasi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan mengatur sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi sebagai pihak yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian juga melibatkan pemusatan wewenang di level pimpinan organisasi, pembagian tugas pekerjaan, kesatuan pengarahan serta sentralisasi pada tingkat jenjang organisasi. Proses pengorganisasian menyangkut bagaimana strategi yang telah direncanakan kemudian dilakukan penyesuaian dengan struktur organisasi yang tepat, serta sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, sehingga sumber daya manusia sebagai pelaksana dapat bekerja secara efektif dan efisien. Pengorganisasian mencakup proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok.

3. Pengarahan

Pengarahan merupakan proses memberikan dorongan pada karyawan dalam bekerja termasuk dalam memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam melaksanakan rencana sehingga mampu dalam menjalankan tanggungjawab dan mencapai produktifitas yang tinggi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi, pengarahan berfokus pada pemberian petunjuk dan arahan dengan tepat kepada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi agar tugas yang diberikan dapat dijerjakan pula dengan cepat dan tepat.

4. Pengkoordinasian

Koordinasi berkaitan dengan kerjasama antar karyawan yang mencakup proses koordinasi antar lini dalam organisasi melalui komunikasi formal maupun informal. Pengkoordinasian bertujuan untuk menyelaraskan semua kegiatan agar berjalan sesuai dengan perencanaan awal, serta memastikan kerja sama antara berbagai bagian organisasi untuk pencapaian tujuan bersama.

5. Pengendalian

Pengendalian merupakan aktivitas dalam menilai kinerja berdasarkan yang telah dibuat untuk kemudian dijadikan acuan dalam perubahan dan perbaikan yang diperlukan. Pengendalian mengawasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta tindakan korektif jika diperlukan.



1.3.2 Konsep Sistem Informasi Manajemen

Menurut McLeod dalam Puspitasari (2016), sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Selanjutnya oleh Nugroho (Hermanto, 2016) sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya.

Sistem informasi didefinisikan sebagai serangkaian elemen yang saling berkaitan dan berfungsi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, proses dan penyebaran informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan serta menjadi pengawas di sebuah organisasi sehingga tujuannya tercapai (Laudon, 2017).

Sistem informasi manajemen menurut Kadir didefinisikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk menunjukkan atau menyajikan suatu sistem yang digunakan untuk menunjukkan atau menyajikan suatu informasi tertentu yang berguna dalam mendukung operasional, pengambilan keputusan maupun manajemen dalam suatu organisasi.

Menurut Murdick dan Ross dalam Sutabri (2016), Sistem Informasi Manajemen adalah proses komunikasi di mana informasi masukan (input) direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan.

Karakteristik Sistem Informasi Manajemen dikemukakan oleh Goyal (2003) yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan pendekatan sistem (system approach), merupakan suatu cara pandang yang bersifat menyeluruh dalam mempelajari bagian-bagian atau sub-sub sistem yang beroperasi dalam suatu organisasi.
2. Berorientasi pada manajemen (management oriented), pengembangan SIM harus berawal dari penentuan kebutuhan di level manajemen serta sasaran organisasi secara keseluruhan dan menekankan bahwa manajemen harus secara aktif terlibat dalam mengarahkan berbagai upaya pengembangan SIM.
3. Berdasarkan kebutuhan (need based), perancangan dan pengembangan dari SIM harus didasarkan pada kebutuhan informasi dari para manajer pada setiap level manajemen, baik level perencanaan strategis, pengendalian manajemen, maupun pengendalian operasional.
4. Berbasis pengecualian (exception based), SIM harus mampu menangani



uar situasi yang normal atau biasa, sebagai contoh nilai-nilai , minimum, atau yang diharapkan di luar batas toleransi.

si pada masa depan (future oriented), SIM tidak hanya r informasi terkait masa lampau atau historis melainkan juga yajikan informasi berbasis proyeksi yang didasarkan pada ndakan yang akan diambil di masa yang akan datang

6. Terpadu (integrated), dengan integrasi SIM akan mampu menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat.
7. Memiliki database pusat (central database), database terpusat merupakan suatu wadah yang menangani berbagai sistem fungsional secara bersama.

Sedangkan menurut Raymon McLeod mengatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri:

- 1) Akurat artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut akurat.
- 2) Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
- 3) Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
- 4) Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada fakturnya.

Komponen dari Sistem Informasi Manajemen menurut Decky, dkk (2023), yaitu:

- 1) Perangkat keras, merupakan perangkat atau peralatan yang berhubungan dengan fisik komputer.
- 2) Perangkat lunak, merupakan program yang digunakan dalam komputer.
- 3) Database, merupakan media yang berhubungan dengan penyimpanan data dan informasi.
- 4) Prosedur, merupakan aturan dan tahap-tahap penggunaan sistem informasi.
- 5) Personalialia, merupakan sumber daya manusia yang merancang, membangun, menjalankan dan mengoperasikan serta memelihara sistem informasi.
- 6) Infrastruktur teknologi, merupakan sarana dan prasarana jaringan komputer, telekomunikasi dan internet.

Menurut Purnama (2016) fungsi dari penerapan sistem informasi manajemen meliputi:

- 1) Akseibilitas yang meningkat dari kecepatan penyajian data maupun akurasi



tersediaan keterampilan dan kualitas pemanfaatan sistem yang kritis.

pengembangan efektivitas proses perencanaan.

dan mengidentifikasi kebutuhan terkait keterampilan pendukung

investasi pada sistem yang digunakan.

- 6) Sebagai acuan antisipasi dan pemahaman akan konsekuensi ekonomi dari teknologi baru.
- 7) Mempermudah perbaikan produktivitas dengan pemeliharaan dan pengembangan sistem.
- 8) Sebagai sistem olah data transaksi, pengurangan biaya serta menjadi sumber pendapatan dari salah satu produk layanan perusahaan.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi, beberapa tren terkini dalam SIM mencakup penggunaan teknologi baru, integrasi kecerdasan buatan, dan dampak transformasi digital yang signifikan (Erwin et al., 2023a). Pertama, penggunaan teknologi baru menjadi tren yang mencolok dalam SIM. Teknologi seperti Internet of Things (IoT), cloud computing, dan big data analytics semakin diterapkan untuk meningkatkan kapabilitas SIM. Laudon (2017) mengamati bahwa teknologi baru memberikan kemampuan pengumpulan dan analisis data yang lebih canggih, memperluas ruang lingkup informasi yang dapat dimanfaatkan oleh SIM. Dengan adopsi teknologi baru, SIM dapat lebih efektif mengelola dan menganalisis data dalam skala yang lebih besar.

Kemudian, integrasi kecerdasan buatan (AI) menjadi tren yang semakin dominan dalam SIM. Kecerdasan buatan digunakan untuk meningkatkan kemampuan analisis dan prediksi SIM. Alter (2008) mengemukakan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam SIM dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan memprediksi tren dengan akurasi yang lebih tinggi. Integrasi AI dapat membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih cerdas dan merespons dinamika pasar dengan lebih adaptif.

Dampak transformasi digital juga menjadi tren penting dalam SIM. Organisasi semakin memahami pentingnya bertransformasi secara digital untuk tetap kompetitif (Sono et al. 2023). McLeod (1983) menyoroti bahwa transformasi digital merubah cara organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan Informasi. SIM terlibat secara langsung dalam menyediakan dasar informasi untuk inisiatif transformasi digital, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dengan lebih cepat dan efektif (Erwin et al., 2023; Prahendratno et al, 2023). Dalam keseluruhan, tren terkini dalam SIM mencerminkan evolusi teknologi dan kebutuhan organisasi yang semakin kompleks. Adopsi teknologi baru, integrasi kecerdasan buatan, dan transformasi digital menjadi kunci bagi organisasi yang ingin memanfaatkan potensi penuh dari Sistem Informasi Manajemen dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ini.

Adapun proses dari Sistem Informasi Manajemen yang dikemukakan oleh



tu:

lan data

wal dalam SIM yang dilakukan melalui berbagai metode seperti sor, atau input manual, data dikumpulkan dari berbagai sumber ciptakan basis informasi yang kaya dan relevaan (Laudon & 2017, Rainer & Prince, 2021).

an data

Sistem basis data digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur, menyediakan akses yang cepat dan efisien saat diperlukan (Q,brien & Marakas, 2006). Penyimpanan yang baik menjadi kunci untuk menjaga integritas dan ketersediaan data.

3. Pemrosesan data

Pemrosesan data juga melibatkan transformasi data mentah menjadi informasi yang dapat dimengerti. Tahapan ini memerlukan perangkat lunak SIM melakukan operasi seperti pengelompokan, pengurutan, dan perhitungan untuk menghasilkan informasi yang bermakna (McLead, 1983).

4. Analisis data

Analisis data merupakan langkah kritis dalam proses SIM, di mana informasi yang telah diproses dianalisis untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Algoritma analitis digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung (Alter, 2008 ; Homlund et al., 2020).

5. Penyajian data

Penyajian data adalah proses mempresentasikan informasi yang telah dianalisis dengan cara yang dapat dimengerti oleh pengguna. Ini bisa melibatkan pembuatan laporan, grafik, atau dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial (Laudon, 2017).

Adanya prosedur yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa data dikumpulkan, diproses, dan disajikan dengan cara yang mendukung pengambilan keputusan.

1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen dipengaruhi oleh berbagai faktor yang beragam dan saling terkait. Dalam penelitian oleh Hermanto (2016) mengenai faktor-faktor dalam sistem informasi manajemen, terdapat lima dimensi untuk melihat sebuah sistem informasi manajemen, yaitu:

1. Data

Data berkaitan dengan ketersediaan data yang akurat dan relevan untuk mendukung keberhasilan sistem. Menurut Ralston dan Reilly (dalam Chamidi, 2004), data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Adanya data yang menyediakan informasi sebagai acuan dalam membuat keputusan yang tepat.



Informasi manajemen melibatkan pengguna, pengelola dan SIM, serta bagaimana keterampilan, pengetahuan, dan individu memengaruhi efektivitas penggunaan sistem. Menurut Davis, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang melibatkan manusia dan mesin untuk menyajikan informasi yang

mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam konteks ini, manusia tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai pengolah informasi yang krusial dalam proses pengambilan keputusan.

3. Aktivitas SIM

Aktivitas SIM mencakup kegiatan dan tugas yang dilakukan menggunakan SIM dengan melibatkan pengolahan data, pengambilan keputusan, dan pelaporan. Hal ini merupakan serangkaian proses dalam sistem informasi manajemen yang merujuk pada cara sistem informasi diintegrasikan ke dalam praktik manajerial sehari-hari.

4. Jaringan Telekomunikasi

memastikan konektivitas dan aksesibilitas data sehingga pertukaran informasi menjadi lancar. Menurut Dr. Vladimir (1967), kemajuan dalam telekomunikasi memungkinkan organisasi untuk mengakses data dari lokasi yang jauh dalam waktu singkat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan adanya jaringan yang efisien, pengelola dapat berkomunikasi dan berbagi informasi secara real-time, serta dapat meningkatkan kolaborasi antar tim.

5. Teknologi komputer

mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SIM. Adanya teknologi komputer memungkinkan otomatisasi berbagai proses kerja organisasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Menurut penelitian, otomatisasi ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat pengolahan data. Dengan sistem yang terkomputerisasi, organisasi dapat mengelola informasi lebih cepat dan akurat, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Meskipun keberhasilan SIM sangat bergantung pada kemampuan teknologi sebagai dasar utama dalam pengembangan dan operasional SIM, faktor manusia dan proses dalam mengelola sistem informasi juga sangat memberi pengaruh terhadap keberhasilannya. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor secara keseluruhan, dapat meningkatkan efektivitas SIM, sehingga tercapainya tujuan organisasi dengan lebih baik.

1.3.4 Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan sistem data berbentuk elektronik yang memuat informasi mengenai status sosial, ekonomi, dan demografi dari 40 persen penduduk di Indonesia, mulai dari yang memiliki status kesejahteraan



dasarakan peraturan Menteri sosial nomor 3 tahun 2021 Data (Goyal, 2003) Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data a pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan osial.

gunakan suatu basis data terpadu yang diperuntukkan bagi n sosial dan penanganan kemiskinan di Indonesia diawali

dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dari PSE ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan beberapa program yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian setelah 3 tahun, data PSE dimutakhirkan pada tahun 2008 melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Pada data PPLS menggunakan klasifikasi rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM) dan rumah tangga hampir miskin (RTHM), dan perkembangannya pada 2011 data PPLS mencakup lebih banyak lagi data. Pada tahun 2015, PPLS diperbaharui oleh BPS melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dikelola oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga. PBDT ini merupakan penajaman dari PPLS sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

Pada tahun 2016, pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pustadin Kesos). Kemudian tanggung jawab dalam melakukan pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang kemudian pada tahun 2017 digunakan sebagai sistem untuk mengelola data terpadu yang mencakup data program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta data Program Perlindungan Sosial. Saat ini, pengelolaan DTKS berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

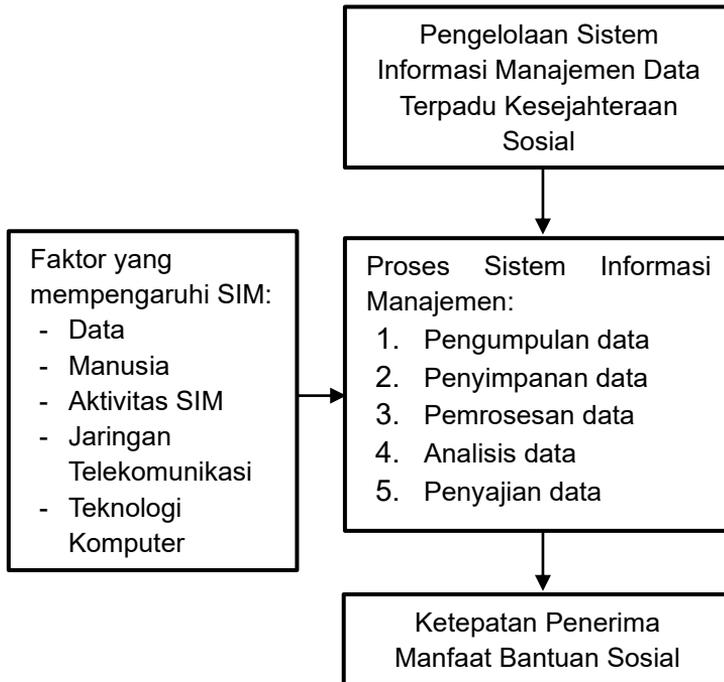
Pengolahan data dilakukan dengan mengolah data mentah yang kemudian diukur nilai kegunaannya untuk menghasilkan informasi yang berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengolahan data mencakup kegiatan-kegiatan penyimpanan data dan penanganan data sampai pada penggunaan data yang menjadi informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menjelaskan bahwa pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam peraturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan akseibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kerangka berpikir berkaitan dengan teori dan pendekatan atau konsep yang dianalisis dan atau mengkaji suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian ini dilakukan. Ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan untuk memuat hasil penelitian berdasarkan teori dan kerangka



penelitian ini menggunakan konsep pengelolaan untuk menganalisis dan menganalisis data terpadu kesejahteraan sosial sebagai alat untuk menganalisis dan menganalisis data sosial di daerah khususnya Morowali Utara sebagai fokus

lokasi penelitian serta melihat pengelolaan selama ini yang sudah berjalan apakah sudah berada sesuai porosnya atau sebaliknya. Proses pengelolaan data terpadu tersebut dilihat dari dimensi fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganiasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Morowali Utara, terhadap masyarakat penerima manfaat bantuan sosial.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam proses pengelolaan sistem informasi manajemen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Kabupaten



lari penelitian ini, yaitu:

ik

literatur bagi penelitian mendatang mengenai Pengelolaan Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai alat dasar dalam program pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan administrasi publik
- b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji tentang pengelolaan DTKS Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah
- c. Menjadi acuan pembelajaran bagi para pemangku kepentingan untuk memperketat implementasi kebijakan khususnya bantuan sosial
- d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



BAB II METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Penelitian terkait dengan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar yang alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.

3.2 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu pendekatan yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan/informasi secara mendalam tentang hal tersebut (Baxter & Jack, dalam Fadli 2021). Fenomena yang dipilih dalam penelitian disebut sebagai kasus dengan artian fenomena tersebut merupakan hal yang aktual dan sesuatu yang sedang berlangsung.

3.3 Prosedur

2.3.1 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah yang terlibat secara langsung dalam penelitian dan yang benar-benar mengetahui suatu persoalan dan permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah;

1. Operator DTKS Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara
3. Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Kabupaten Morowali Utara
4. Operator DTKS Kelurahan Bahontula
5. Operator DTKS Kelurahan Bahoue



Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah observasi langsung, yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penyusunan hasil penelitian.

2. Wawancara, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan atau dikonsepsikan oleh peneliti sebagai acuan dan sifatnya tidak mengikat. Sehingga dapat menimbulkan pertanyaan baru yang muncul saat wawancara sedang berlangsung terkait dengan topik permasalahan yang diteliti dan sumber informan yang diwawancara.
3. Dokumentasi, selain observasi dan wawancara peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan dengan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumen, buku-buku, peraturan, dan lain sebagainya yang dapat menunjang dan relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan data sekunder untuk memperkuat hasil wawancara terkait topik permasalahan penelitian ini.

2.3.3 Teknik Analisis Data

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, klasifikasi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Jadi reduksi data berfungsi untuk membentuk data-data mentah yang banyak lagi terserak menjadi data yang lebih kecil dan sederhana sambil tetap menjaga struktur tujuan penelitian. Data yang dihasilkan dalam sebuah penelitian tidak terbatas jumlahnya, semakin lama peneliti berada di lapangan semakin kompleks pula data yang dihasilkan. Untuk melakukan reduksi dengan baik dan benar, Parwito (2007) setidaknya merekomendasikan tiga langkah; pertama melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Kedua menyusun kode-kode dan catatan (memo) mengenai beberapa hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti mendapatkan tema, kelompok, dan pola data. Ketiga sebagai langkah akhir dari tahapan reduksi, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok data yang bersangkutan.
2. Menurut Miles dan Huberman (2014), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data adalah aktivitas terorganisir, yang ingin menggambarkan simpulan dan tindakan. Peneliti juga nahami situasi sosial yang sedang terjadi dalam penelitiannya. memperoleh hasil yang valid, Miles dan Huberman mengingatkan es penyajian data dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semakin ses penyajian, semakin valid pula analisis kualitatif silkan.



3. Analisis ketiga yang tidak kalah penting adalah penarikan kesimpulan, yaitu menarik simpulan dan melakukan verifikasi data. Maksimal atau tidak tahapan ini, baik atau tidak simpulan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kedua tahapan sebelumnya. Dalam perspektif Miles dan Huberman (2014), penarikan simpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu simpulan harus diverifikasi terus menerus hingga diperoleh simpulan yang tidak memberikan peluang terhadap simpulan lain. Hal ini dilakukan mengingat penelitian ilmiah adalah penelitian yang dilakukan secara skeptis dan kritis.

2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Penelitian kualitatif belum memiliki standar baku untuk menilai kedua aspek tersebut, dengan demikian standar baku yang digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas terutama ketika hasil penelitian kualitatif dipertanyakan aspek ilmiahnya menjadi hal penting untuk dibahas. Ada anggapan bahwa penelitian yang baik harus mampu memenuhi prinsip standar umum penelitian kuantitatif seperti signifikansi, kesesuaian teori dengan data yang ditemukan, generalisasi, konsistensi, kemampuan untuk dibuktikan kembali, presisi dan verifikasi. Namun, prinsip-prinsip umum tersebut kurang tepat digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif mengembangkan prinsip yang berbeda tentang fenomena sosial.

Dalam penelitian kali ini elemen yang digunakan peneliti untuk menguji validitas dan reliabilitas data menurut Patton (2001) menganjurkan penggunaan triangulasi dengan menyatakan "triangulasi memperkuat penelitian dengan menggabungkan metode. Hal ini dapat berarti menggunakan beberapa jenis metode termasuk menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Moleong (2006) triangulasi untuk mengevaluasi keabsahan data dapat dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan metode, sumber, peneliti dan teori". Triangulasi metode dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa metode, dan pengecekan derajat kepercayaan dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi dengan menggunakan sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 2001). Cara yang dilakukan antara lain dengan membandingkan data hasil observasi dengan wawancara; membandingkan saat situasi resmi waktu penelitian dan situasi informal;

1 wawancara dengan dokumen.

